

LAPORAN FINAL
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI (U)
TAHUN ANGGARAN 2013



**Membongkar Korupsi Politik di Daerah Di Balik Fatsun Gerakan Bias
Gender (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi)**
Tahun ke I (satu) dari rencana 5 (lima) tahun

Dr. M Fadli, SH., MH

NIDN : 0001046502

Dr. Jazim Hamidi, SH., MH

NIDN : 0016116601

Fachrizal Afundi, S.Psi., SH., MH

NIDN : 0009048105

Joko Purnomo, S.IP., MA

NIDN : 0001047807

Diblayal oleh :

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Melalui DIPA Universitas Brawijaya
Nomor : DIPA-023.04.2.414989/2013, Tanggal 5 Desember 2012, dan berdasarkan
SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 153/SK/2013 tanggal 28 Maret 2013

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DESEMBER 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Membongkar Korupsi Politik di Daerah Di Balik Fatsun Gerakan Bias Gender (Rekayasa Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi)

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : Dr.M Fadli ., SH., MH
NIDN : 0001046502
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Hukum
Nomor HP : 081333161111
Alamat surel (e-mail) : mfadlifh@ub.ac.id, mfadlifhubs@yahoo.com

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr. Jazim Hamidi., SH., MH
NIDN : 0016116601
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Anggota (2)

Nama Lengkap : Fachrizal Afandi. S.Psi., SH., MH
NIDN : 0009048105
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Anggota (3)

Nama Lengkap : Joko Purnomo, S.IP, MA
NIDN : 0001047807
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Anggota (4)

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 (satu) dari rencana 5 (lima) tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 250.000.000,-
Biaya Keseluruhan : Rp. 1.450.000.000,-


Malang, 5 Desember 2013

Ketua Peneliti,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sihabudin, SH., MH
NIP. 19591216 198503 1 001



Dr. M Fadli , SH., MH
NIP. 196504011990021001

Menyetujui,
Pjs. Ketua LPPM UB



Prof. Dr. Ir. Siti Chuzaeami, MS.
NIP. 19530514 198002 2 001

ABSTRAK PENELITIAN

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kaitan tingkat kerawanan korupsi dan model kepemimpinan politik perempuan di daerah. *Outcome* penelitian ini adalah terbangunnya desain model antisipasi merebaknya korupsi di tingkat daerah. Hingga saat ini belum ada mekanisme yang ditemukan untuk mengukur kerawanan korupsi daerah. Penelitian ini akan menyusun desain baru penilaian korupsi dengan mengusung konsep *Corruption Vulnerability Index (CVI)*. Pada tahun pertama, penelitian ini akan dilaksanakan di 3 Provinsi di Indonesia, dengan perincian (1) Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi (2) Kota Tanjungpinang, Sumatera (3) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dan (4) Kota Surabaya Jawa Timur. Pilihan wilayah penelitian didasarkan pada keinginan untuk meneliti kerentanan korupsi pada daerah-daerah yang pada pemilihan kepala daerah memenangkan calon perempuan di kepala daerah sebelumnya. Adanya *fatsun* pengarusutamaan kaum perempuan di dunia politik perlu untuk diteliti lebih jauh apakah *fatsun* bias jender memberikan *incentive* atau *disincentive* bagi tingkat kerentanan korupsi daerah.

Keywords: Corruption, Desentralisasi, Gender, Corruption Vulnerability Index

RINGKASAN

Penelitian Membongkar Korupsi Politik di Daerah Di Balik Fatsun Gerakan Bias Gender (Model Alternatif Indeks Kerentanan Korupsi) yang dilaksanakan di daerah Minahasa Selatan, Sulawesi; Kabupaten Tanjung Pinang, Sumatera; Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan Kota Surabaya, Jawa Timur dirancang untuk menganalisa peran daerah dalam pemberantasan korupsi. Pada tahun pertama, penelitian ini memfokuskan pada analisa peran kepala daerah perempuan selama menjalankan kepemimpinan di daerah dalam upaya mengurangi dan atau memberantas tindak korupsi di daerah.

Secara umum terdapat beberapa temuan penting dari penelitian yang sedang kami lakukan. *Pertama*, Tindak korupsi di level lokal terjadi seiring dengan berlangsungnya otonomi daerah. Keleluasaan daerah untuk merancang, menentukan dan melaksanakan proses pembangunan sebagai konsekwensi dari implementasi otonomi daerah pada titik tertentu membuka ruang bagi hadirnya korupsi di tingkat lokal. *Kedua*, Tindak pidana korupsi di level lokal dipengaruhi oleh sejauh mana komitmen dan infrastruktur anti korupsi tersedia di tingkat daerah baik di level pemerintah, kepolisian dan kejaksaan. *Ketiga*, keterkaitan antara pemimpin daerah perempuan dengan tingkat korupsi daerah masih belum diketemukan. Masih perlu untuk diteliti lebih dahulu tentang peran kepemimpinan perempuan dalam mengurangi tindak korupsi dan memperentan tingkat korupsi di level daerah.

Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa arah pelaksanaan otonomi daerah lebih focus pada pencapaian ekonomi. Kebutuhan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang semakin meningkat tahun per tahun, kebutuhan melaksanakan pelayanan publik seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan pelayanan serta kebutuhan untuk melakukan pembangunan di daerah mendorong pemerintah daerah, termasuk kepala daerah perempuan, untuk lebih berorientasi pada pencapaian ekonomi.

Pada akhirnya, penelitian ini menemukan urgensinya pada kurangnya instrumentasi infrastruktur anti korupsi di level lokal. Pada titik inilah penelitian ini menemukan relevansinya dalam rangka berkontribusi pada pencapaian hasil positif dari otonomi daerah.